

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden serta peraturan lainnya. Namun implementasi atas kebijakan tersebut, masih mengalami berbagai kendala, seperti Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang belum sepenuhnya menjadi rujukan *stakeholder* pertahanan dalam menyusun rencana strategisnya dalam upaya penangkalan dan penindakan atas ancaman yang sedang dan akan terjadi serta rencana pemulihan atas dampak ancaman sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penentuan ancaman belum menjadi prioritas sebagai salah satu faktor utama dalam pemilihan strategi guna pencapaian keberhasilan tugas Kementerian/ Lembaga salah satunya dalam penanganan ancaman. Kementerian/ Lembaga lebih fokus kepada pelaksanaan tugas dan fungsinya dan kurang memperhatikan aspek pertahanan negara. Permasalahan lainnya seperti belum adanya integrator pertahanan dan evaluasi yang menyertainya serta kurang melibatkan komponen bangsa lainnya.

Berdasarkan pembahasan dengan menggunakan NVivo, Sistem Aplikasi Pengambilan Keputusan dengan menggunakan metode Delphi (Hak Cipta Nomor 000252783), Pengambilan Keputusan Melalui Metode AHP Berbasis Web (Hak Cipta Nomor 000272475) serta Matrik RASCI untuk membuat model manajemen pertahanan negara. Keempat *tools* tersebut digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya yang pada akhirnya peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

a. Model Manajemen Pertahanan Indonesia saat ini.

Model manajemen pertahanan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan dengan memadukan pertahanan militer dan nirmiliter. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung komponen cadangan dan pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

b. Penentuan ancaman militer dan nonmiliter.

Perkembangan lingkungan strategis yang begitu dinamis sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi yang melahirkan tatanan dunia baru yakni *VUCA World* yang melintasi ruang, waktu, wilayah dan pemikiran. *VUCA World* melahirkan peluang baru dalam aspek kesejahteraan sekaligus menghadirkan berbagai ancaman yang kompleks, destruktif dan sulit diprediksi yang bisa muncul setiap saat karena tidak terbatas ruang dan waktu, namun memberikan dampak yang luar biasa terhadap segala aspek kehidupan.

Sedemikian kompleks dan dinamisnya ancaman terhadap Bangsa Indonesia, sehingga diperlukan adanya sistem aplikasi yang dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman. Sistem Aplikasi Pengambilan Keputusan dengan menggunakan metode Delphi Hak Cipta Nomor 252783 yang merupakan salah satu *novelty* dari penelitian ini yang dapat digunakan untuk menentukan jenis, bentuk, sifat dan skala ancaman yang hasilnya bisa dilihat secara *real time*.

- c. Model Manajemen Pertahanan Indonesia yang mampu menghadapi dan menangkal setiap ancaman militer dan nonmiliter.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak terhadap kemajuan peradaban manusia sekaligus menghadirkan berbagai macam ancaman yang sifatnya baru, baik dari pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman tersebut tentunya akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI serta keselamatan segenap Bangsa Indonesia dan untuk menangani berbagai macam ancaman tersebut, tentunya sangat diperlukan adanya suatu model manajemen pertahanan negara yang responsif terhadap setiap ancaman dengan mengintegrasikan *stakeholder* pertahanan ke dalam satu sistem yang terpadu.

Model manajemen pertahanan yang dikembangkan peneliti adalah model manajemen pertahanan yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Industri Pertahanan, Masyarakat dan Media dibawah satu institusi yang bertindak sebagai integrator pertahanan.

Model ini mengatur tata kelola dan pengorganisasian dengan memetakan tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi antar institusi, adanya kejelasan peran serta adanya mekanisme hubungan kerja antar institusi.

Pengorganisasian yang sedemikian besar tentunya memerlukan metode dalam penyusunannya, salah satu metode yang diterapkan adalah penggunaan AHP dan RASCI guna memetakan peran masing-masing institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan. Adanya institusi yang berperan sebagai integrator pertahanan (**A**uthority), institusi yang berperan sebagai pelaksana (**R**esponsible) dan institusi yang berperan memberikan dukungan, konsultasi dan informasi (**S**upport, **C**ounsel, **I**nform).

Penentuan integrator pertahanan menggunakan *tools* Pengambilan Keputusan dengan Metode AHP Berbasis Web Hak Cipta Nomor 272475, yang hasilnya menyatakan bahwa Dewan Keamanan Nasional merupakan pilihan pertama sebagai integrator pertahanan, Kemhan pilihan kedua dan terakhir Dewan Pertahanan Nasional.

Matrik RASCI digunakan untuk memetakan tugas dan fungsi setiap Kementerian/Lembaga (**R**esponsible) guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan ancaman, baik sebelum, sedang dan setelah ancaman terjadi. Setiap Kementerian/Lembaga (**R**esponsible) mempunyai peran masing-masing, yang saling melengkapi satu sama lainnya dibawah Pimpinan Dewan Keamanan Nasional dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Industri Pertahanan, Masyarakat serta Media (**S**upport, **C**ounsel, **I**nform).

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Pertahanan negara merupakan tugas dan tanggung jawab semua elemen bangsa, sehingga diperlukan cara berfikir yang kritis dan ilmiah guna membangun pertahanan negara melalui pengayaan khasanah keilmuan manajemen pertahanan khususnya dalam mengembangkan organisasi dan tata kelola pertahanan negara yang lebih spesifik, untuk itu direkomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk:

- a. Pembuatan model organisasi yang lebih detail guna memadukan pertahanan militer dan nirmiliter dengan melibatkan para *stakeholder* terkait.
- b. Pembuatan model tata kelola organisasi yang mengatur mekanisme hubungan kerja antar institusi yang terlibat dalam sektor pertahanan negara.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Pertahanan negara merupakan kebutuhan Bangsa Indonesia dalam rangka terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dan untuk memastikan hal tersebut, tentunya diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi dari *stakeholder* pertahanan, untuk itu peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah pertahanan negara dengan mengembangkan model manajemen pertahanan negara yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter.
- b. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk dapatnya melakukan *assessment* terhadap ancaman

dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengambilan Keputusan dengan pendekatan metode Delphi untuk mengetahui jenis, bentuk, sifat dan skala ancaman guna memudahkan dalam menentukan strategi dan kebijakan dalam penanganan setiap ancaman.

- c. Bagi Kementerian/Lembaga, sebagai acuan dalam penyusunan *Standard Operational Procedure* penanganan ancaman dengan menggunakan pendekatan metode RASCI.
- d. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai referensi dan bahan kajian untuk mengembangkan model manajemen pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.
- e. Bagi Industri Pertahanan, sebagai acuan dalam mengembangkan teknologi pertahanan dalam rangka mendukung kemandirian pengadaan Alutsista TNI serta dalam upaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.
- f. Bagi Masyarakat dan Media, lebih mengetahui tentang pertahanan negara sehingga bisa membangkitkan kesadaran bela negara dimanapun berada dan dalam profesi apapun.